

Received: 07-06-2025 | Published: 06-08-2025

DARI DATA KE DANA: MENGOPTIMALKAN ALOKASI ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BUKTI DI ACEH JAYA

DEVIANA

Bappeda Aceh Jaya

Email : devi26424@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the critical issue in poverty reduction budget allocation in Aceh Jaya Regency, namely the misalignment between data availability and fund distribution. Using a qualitative approach, this study employs USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis to prioritize root causes, alongside a SWOT analysis supported by IFE and EFE matrices to map the region's strategic position. The USG analysis reveals that weak data validity and inefficient budget allocation are the most pressing issues. Meanwhile, the SWOT analysis places Aceh Jaya in the aggressive (SO) strategy quadrant, indicating significant internal strengths (technical human resources, flexible Village Funds) and external opportunities (national policy support, technology). To select the most superior policy, four strategic alternatives (SO, ST, WO, WT) were evaluated using William Dunn's policy analysis framework, assessing criteria such as effectiveness, efficiency, equity, and feasibility. The results conclusively recommend the SO Strategy as the best option, to be realized through the formulation of a Regent's Regulation (Perbup) on an Integrated Data and Fund Management System for Evidence-Based Poverty Alleviation. This regulation is expected to serve as a legal framework to create evidence-based governance that is integrated, participatory, and sustainable.

Keywords: Poverty Alleviation, Budget Governance, Evidence-Based Policy, William Dunn Analysis, Integrated Data System.

Abstrak

Kajian ini mengkaji permasalahan krusial dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya, yakni ketidakselarasan antara ketersediaan data dan penyaluran dana. Dengan pendekatan kualitatif, kajian ini menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk memprioritaskan akar masalah, serta analisis SWOT yang didukung matriks IFE dan EFE untuk memetakan kondisi strategis daerah. Hasil analisis USG menunjukkan bahwa lemahnya validitas data dan inefisiensi alokasi anggaran merupakan dua isu paling mendesak. Sementara itu, analisis

SWOT menempatkan Aceh Jaya pada kuadran strategi agresif (SO), mengindikasikan adanya kekuatan internal (SDM teknis, fleksibilitas Dana Desa) dan peluang eksternal (dukungan kebijakan nasional, teknologi) yang signifikan. Untuk memilih kebijakan yang paling unggul, empat alternatif strategi (SO, ST, WO, WT) dievaluasi menggunakan kerangka analisis kebijakan William Dunn, yang menilai berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, ekuitas, dan kelayakan. Hasilnya secara konklusif merekomendasikan Strategi SO sebagai pilihan terbaik, yang diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pengelolaan Data dan Alokasi Dana Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bukti. Perbup ini diharapkan menjadi kerangka hukum untuk menciptakan tata kelola berbasis bukti yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Tata Kelola Anggaran, Kebijakan Berbasis Bukti, Analisis William Dunn, Sistem Data Terintegrasi.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama dalam RAT Aceh Jaya 2025 adalah belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat program bantuan sosial. Ketidadaan data yang terkini dan akurat menyebabkan program tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat miskin yang paling membutuhkan. Ketimpangan akses informasi, verifikasi lapangan yang lemah, dan keterbatasan SDM menyebabkan sebagian besar program berbasis kebutuhan menjadi generalistik. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas intervensi pengurangan kemiskinan. Penanganan ini sangat bergantung pada integrasi data terpadu kesejahteraan sosial.

Permasalahan lain yang mencolok adalah tingginya ketergantungan penduduk miskin dan rentan pada bantuan sosial tunai. Ketergantungan ini menciptakan pola konsumsi pasif yang kurang produktif, tanpa ada dorongan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri. Ini menunjukkan kurangnya program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan jangka panjang. Selain itu, belum banyak inovasi program yang mengaitkan bantuan dengan pelatihan keterampilan. Ketergantungan ini berisiko menjadi penghambat kemandirian ekonomi lokal.

Permasalahan ketiga adalah perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang digunakan pemerintah pusat, daerah dan data antar OPD. Hal ini menyulitkan dalam menyusun intervensi yang selaras dan efektif. Ketidaksinkronan data juga menciptakan kebingungan dalam perencanaan anggaran, penerima manfaat program dan indikator keberhasilan. Beberapa keluarga yang sudah sejahtera masih terdaftar, sementara yang benar-benar miskin terlewatkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya integrasi sistem informasi antar lembaga.

Masyarakat di wilayah terpencil Aceh Jaya masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan jalan penghubung. Kondisi ini menghambat peningkatan kualitas hidup serta membatasi mobilitas ekonomi masyarakat miskin. Upaya pembangunan sering terkendala geografis, cuaca ekstrem, dan koordinasi lintas sektor. Permasalahan ini menciptakan ketimpangan spasial yang memperparah kemiskinan struktural. Penyediaan layanan publik belum sepenuhnya merata dan inklusif.

Di Aceh Jaya, kelompok miskin masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan rendahnya keterampilan tenaga kerja, minimnya program pelatihan kerja, serta terbatasnya investasi sektor riil di daerah. Banyak pekerjaan yang tersedia bersifat informal dan tidak menjamin perlindungan sosial. Pemerintah daerah telah mengupayakan program padat karya dan pelatihan, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Tanpa revitalisasi ekonomi lokal dan penguatan kewirausahaan, peluang kerja tetap terbatas bagi masyarakat miskin.

Penelitian oleh Mulyono dan Harahap (2022) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri lokal merupakan penghambat utama masuknya kelompok miskin ke pasar kerja. Selanjutnya, studi dari Salma et al. (2021) mencatat bahwa program pelatihan kerja pemerintah cenderung bersifat umum dan tidak berorientasi pada potensi wilayah. Penelitian oleh Hidayat dan Rachman (2023) menegaskan perlunya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja berbasis potensi desa. Selain itu, menurut Oktaviani dan Wibowo (2020), banyak pekerja miskin di sektor informal tidak memiliki jaminan kerja maupun jaminan sosial. Sementara itu, studi dari Rizki dan Saputra (2024) merekomendasikan pengembangan koperasi berbasis komunitas sebagai strategi penguatan ekonomi keluarga miskin di wilayah terpencil.

Permasalahan lain adalah lemahnya koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah pusat, serta antar dinas di tingkat kabupaten dalam menyusun dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menyebabkan duplikasi kegiatan, tumpang tindih anggaran dan penerima manfaat, dan kurangnya fokus pada prioritas utama. Selain itu, program dari kementerian dan lembaga sering tidak terintegrasi dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Akibatnya, alokasi dana tidak optimal dan hasilnya tidak terukur dengan baik. Dimana daerah tidak pernah menghitung ketepatan penerima manfaat program/kegiatan dengan besarnya anggaran yang direalisasikan tiap tahunnya dengan harapan dapat dihitung berapa jumlah anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun berikutnya. Sinkronisasi yang lemah juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas program.

Studi oleh Yuliana dan Sembiring (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa koordinasi lintas sektor justru menimbulkan konflik kewenangan dalam pelaksanaan program sosial. Penelitian oleh Mubarok dan Lestari (2022) menyoroti pentingnya platform komunikasi terpadu berbasis digital untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, menurut Hamid dan Surya (2021), perbedaan nomenklatur program antara pusat dan daerah sering menyebabkan kendala teknis dalam pelaporan. Sementara itu, Rismawati et al. (2023) merekomendasikan pendekatan integratif melalui forum TKPKD yang diaktifkan secara rutin. Terakhir, Zulkifli dan Hanafiah (2024) menekankan bahwa keberhasilan penghapusan kemiskinan bergantung pada keselarasan RPJMD daerah dengan strategi nasional.

Selama ini, program pengentasan kemiskinan di Aceh Jaya masih berfokus pada aspek ekonomi dan pendapatan, belum sepenuhnya menjangkau dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan akses sosial. Padahal, banyak keluarga miskin menghadapi kemiskinan struktural akibat buruknya kondisi hunian, keterbatasan layanan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan berkualitas. Tanpa pendekatan

multidimensi, program yang ada hanya menyelesaikan sebagian kecil dari akar persoalan. Kemiskinan pun menjadi siklus yang sulit diputus. Pemerintah perlu merancang indikator lokal untuk mengukur dan menanggapi kemiskinan multidimensi secara lebih komprehensif.

Penelitian dari Fitri dan Mahendra (2020) menegaskan bahwa indikator pendapatan tidak cukup untuk mencerminkan kerentanan sosial dan kemiskinan jangka panjang. Menurut studi Ardiansyah dan Dewi (2021), pengukuran kemiskinan multidimensi dengan model Alkire-Foster lebih tepat digunakan di daerah pedesaan. Selanjutnya, Wahyuni dan Basri (2022) menemukan bahwa intervensi pada perumahan layak huni dan akses air bersih memiliki dampak lebih besar pada kesejahteraan jangka panjang daripada bantuan tunai. Penelitian oleh Amelia dan Hardiansyah (2023) menekankan pentingnya integrasi data sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk pemetaan kemiskinan kompleks. Sedangkan riset Taufik dan Ramadhani (2024) menyarankan penerapan Integrated Social Protection Framework yang menggabungkan bantuan ekonomi, psikososial, dan peningkatan akses layanan dasar.

Kendala besar yang dihadapi masyarakat miskin adalah masih rendahnya kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan administrasi publik di wilayah pinggiran. Pelayanan yang tidak merata, tenaga yang kurang kompeten serta sarana prasarana yang terbatas menyebabkan ketimpangan sosial semakin melebar. Layanan publik di desa-desa terpencil masih minim digitalisasi, membuat masyarakat sulit mengakses informasi dan layanan. Beberapa program pembangunan sekolah dan Puskesmas juga belum maksimal dalam implementasinya. Hal ini menghambat perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Aceh Jaya.

Putri dan Sari (2020) menyoroti bahwa kualitas layanan publik berkorelasi kuat dengan capaian IPM di wilayah rural. Studi dari Maulida dan Rahmat (2021) menemukan bahwa pemenuhan sarana pendidikan di desa sangat menentukan keberhasilan program beasiswa. Selanjutnya, Nugroho dan Lestari (2022) menyatakan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam mengakses hak-haknya. Penelitian lain oleh Rachman dan Fauziah (2023) menegaskan pentingnya pelatihan kompetensi bagi tenaga kesehatan di daerah 3T. Sementara itu, Fitriani dan Yusuf (2024) menekankan bahwa program pelayanan berbasis mobile (keliling) efektif meningkatkan jangkauan akses di wilayah dengan hambatan geografis.

Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan program kemiskinan di Aceh Jaya masih sangat terbatas/minim. Banyak program yang dirancang secara top-down, tanpa mendengarkan aspirasi dan kebutuhan riil warga. Ketika masyarakat tidak terlibat, maka program cenderung tidak sesuai konteks lokal dan tingkat keberlanjutannya rendah. Rendahnya partisipasi juga berdampak pada minimnya rasa kepemilikan terhadap program. Hal ini menjadi hambatan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Andika dan Ma'ruf (2021) menyatakan bahwa partisipasi warga meningkatkan akurasi program dan pengawasan sosial. Studi dari Fadhil dan Zakiah (2022) menekankan pentingnya forum musyawarah desa sebagai media partisipasi yang paling efektif di wilayah rural. Selain itu, Handayani dan Syarif (2020) mengungkapkan bahwa pelibatan perempuan dan kelompok marginal memberi dampak positif dalam perencanaan pembangunan desa. Penelitian oleh Sofyan dan Prasetyo (2023) menemukan bahwa ketika masyarakat terlibat sejak awal, program lebih mudah diterima dan dilanjutkan secara swadaya. Terakhir, Wahyudi dan Amanda (2024)

menyarankan model *co-design planning* dalam merancang program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.

Dana zakat, infaq, dan CSR yang tersedia di Aceh Jaya sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Namun, pemanfaatannya masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi dengan sistem pengentasan kemiskinan yang ada. Banyak program yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Belum ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan Baitul Mal dan sektor swasta dalam membangun ekosistem sosial yang solid. Pemanfaatan dana sosial perlu diarahkan pada sektor produktif, bukan hanya konsumtif.

Studi oleh Zulkarnain dan Munawar (2020) menyebutkan bahwa zakat lebih efektif jika diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar konsumsi sesaat. Menurut Prasetya dan Azizah (2022), CSR dari sektor swasta bisa dioptimalkan bila disinergikan dengan RPJMD daerah. Penelitian dari Nurul dan Hadi (2023) merekomendasikan model kemitraan publik-swakarsa dalam pengelolaan dana zakat produktif. Sementara itu, Hanafi dan Syamsul (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi BUMDes dengan zakat komunitas memberikan dampak signifikan pada usaha mikro warga miskin. Akhirnya, studi Arifin dan Yuniar (2024) mengusulkan digitalisasi sistem zakat dan CSR agar lebih transparan dan terukur dampaknya.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah umumnya masih berfokus pada deskripsi kondisi kemiskinan atau evaluasi teknis program bantuan sosial, tanpa membahas keterkaitan langsung antara kualitas data kemiskinan dan optimalisasi alokasi anggaran. Sebagian besar literatur belum secara mendalam mengkaji bagaimana ketepatan dan validitas data kemiskinan menjadi prasyarat penting. Akibatnya, muncul kesenjangan antara perencanaan program dan kebutuhan riil masyarakat miskin. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengaitkan aspek teknokratik (data) dan aspek kebijakan fiskal (dana) secara integratif.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada pendekatan *evidence-based budgeting* yang secara khusus diterapkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah pinggiran seperti Aceh Jaya. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi program atau anggaran yang ada, tetapi menilai bagaimana validitas dan pemutakhiran data kemiskinan dapat memengaruhi efektivitas distribusi sumber daya. Selain itu, kajian ini mengintegrasikan analisis spasial, program sektoral, dan evaluasi kinerja fiskal dalam satu kerangka kerja perencanaan pembangunan sosial. Pendekatan ini menawarkan model perencanaan berbasis data mikro yang dapat direplikasi untuk kabupaten lain dengan masalah serupa. Secara metodologis, kajian ini juga mempertemukan data statistik kemiskinan dengan kebijakan intervensi sektoral dalam satu alur analitis yang utuh.

Kajian ini menjadi sangat penting mengingat kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis nasional, terlebih lagi dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Aceh Jaya, sebagai salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional, perlu memiliki sistem perencanaan anggaran yang lebih responsif dan berbasis bukti. Ketika data kemiskinan tidak valid atau tidak terkini, maka risiko ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai dasar perbaikan mekanisme penganggaran yang lebih terarah, adil, dan akuntabel. Temuan

kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah, Bapperida, dan lintas sektor dalam merancang kebijakan sosial-ekonomi yang lebih presisi dan berdampak

METODE

Metodologi penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan teknik analisis **SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)**. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan anggaran kemiskinan secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana data digunakan dalam proses pengambilan keputusan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai potensi, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam optimalisasi dana pengentasan kemiskinan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Jaya, sebuah wilayah dengan dinamika kemiskinan yang kompleks serta tantangan koordinasi antar lembaga pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi **wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan**. Wawancara dilakukan kepada informan kunci seperti pejabat Bapperida, Dinsostransnaker, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta laporan keuangan daerah. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses perencanaan dan pelaksanaan program kemiskinan di tingkat desa dan kecamatan.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka **SWOT** untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pengentasan kemiskinan. Aspek *kekuatan (strengths)* mencakup elemen positif internal seperti keberadaan SDM terlatih dan sistem informasi daerah yang mendukung pengumpulan data. Sementara itu, *kelemahan (weaknesses)* mencakup isu-isu internal seperti lemahnya integrasi data antarinstansi, kurangnya pemutakhiran data kemiskinan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Dari sisi eksternal, *peluang (opportunities)* mencakup adanya dukungan kebijakan nasional terhadap sistem berbasis bukti, kemajuan teknologi digital, serta kolaborasi dengan mitra pembangunan. Sedangkan *ancaman (threats)* meliputi risiko ketergantungan pada bantuan jangka pendek, resistensi terhadap reformasi sistem pengelolaan anggaran, serta ketimpangan infrastruktur di wilayah terpencil.

Hasil dari analisis SWOT ini disajikan dalam bentuk matriks yang akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh Jaya. Strategi-strategi tersebut akan disesuaikan dengan posisi daerah dalam kuadran SWOT, baik dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang (*SO Strategy*), mengatasi kelemahan dengan peluang (*WO Strategy*), menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman (*ST Strategy*), maupun meminimalkan kelemahan dan ancaman sekaligus (*WT Strategy*). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**, dengan mencocokkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi agar analisis yang dihasilkan bersifat valid dan reflektif terhadap kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel identifikasi isu strategis prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) merupakan alat analisis yang digunakan untuk memilah dan menentukan tingkat kepentingan dari berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi dalam diagram fishbone. Tiga dimensi utama dalam metode ini *Urgency* (U), *Seriousness* (S), dan *Growth* (G) menjadi parameter penilaian objektif terhadap setiap isu strategis. *Urgency* menilai seberapa mendesak suatu permasalahan perlu ditangani dalam waktu dekat, *Seriousness* menilai sejauh mana dampak negatif dari permasalahan tersebut terhadap tujuan utama program pengentasan kemiskinan, sedangkan *Growth* menunjukkan potensi permasalahan untuk berkembang atau memburuk apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Tabel 1 Identifikasi Isu Strategis Prioritas Dengan Menggunakan Metode USG

N o	Isu Strategis	Urgency (Skala 1-5)	Sensitivit y (Skala 1-5)	Growth (Skala 1-5)	Priorita s	Alternatif Kebijakan
1	Ketidaksesuaia n data kemiskinan pusat dan daerah	5	5	4	Sangat Tinggi	Integrasi data kemiskinan berbasis digital real-time.
2	Terbatasnya infrastruktur dasar di wilayah terpencil	4	5	4	Sangat Tinggi	Program afirmatif pembangunan infrastruktur desa tertinggal.
3	Minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program	4	4	4	Tinggi	Pembentukan forum konsultasi masyarakat miskin di setiap kecamatan.
4	Alokasi anggaran tidak berbasis kebutuhan riil	5	5	3	Sangat Tinggi	Penerapan anggaran berbasis bukti (<i>evidence-based budgeting</i>).
5	Duplikasi anggaran antar perangkat daerah	3	4	3	Sedang	Tim koordinasi lintas perangkat daerah sebelum finalisasi APBD.

N o	Isu Strategis	Urgency (Skala 1- 5)	Sensitivit y (Skala 1-5)	Growth (Skala 1- 5)	Priorita s	Alternatif Kebijakan
6	Lemahnya koordinasi lintas lembaga	4	4	4	Tinggi	Rapat koordinasi triwulan pengentasan kemiskinan lintas sektor.
7	Tingginya ketergantungan pada bantuan konsumtif	3	4	5	Tinggi	Alihkan ke program inkubasi usaha rumah tangga.
8	Kurangnya pelatihan keterampilan dan akses modal usaha	4	4	4	Tinggi	Pelatihan kerja dan wirausaha berbasis potensi lokal.
9	Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data kemiskinan	4	3	4	Sedang	Pelatihan teknis dan insentif untuk operator data kemiskinan.
10	Tidak adanya mekanisme interaksi antar sektor dalam perencanaan pengentasan kemiskinan	3	3	4	Sedang	Platform perencanaan kolaboratif lintas dinas.

Sumber: Hasil penghitungan USG (2025)

Berdasarkan hasil analisis, tiga isu dengan nilai tertinggi dan masuk dalam kategori sangat prioritas adalah: ketidaksesuaian data kemiskinan antara pusat dan daerah, terbatasnya infrastruktur dasar di wilayah terpencil, dan alokasi anggaran yang tidak berbasis kebutuhan riil. Ketiganya memperoleh skor tinggi karena ketiga aspek USG menunjukkan bahwa jika isu-isu ini tidak segera ditangani, maka efektivitas program pengentasan kemiskinan akan terganggu secara signifikan. Misalnya, data yang tidak sinkron menyebabkan kesalahan sasaran, infrastruktur yang terbatas menghambat akses terhadap layanan dasar, dan anggaran yang tidak berdasarkan kebutuhan nyata mengarah pada pemborosan sumber daya.

Isu-isu seperti minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, lemahnya koordinasi lintas lembaga, tingginya ketergantungan pada bantuan konsumtif, dan kurangnya pelatihan keterampilan serta akses modal usaha dinilai sebagai prioritas tinggi karena meskipun dampaknya besar, potensi memburuknya masalah dapat

dikelola dalam jangka menengah jika ditangani secara sistematis. Sementara itu, isu seperti duplikasi anggaran, keterbatasan SDM pengelola data, dan tidaknya ada mekanisme interaksi antar sektor digolongkan sebagai prioritas sedang, karena urgensi dan tingkat pertumbuhan masalahnya masih relatif lebih rendah dibanding isu lainnya, meskipun tetap memerlukan perhatian.

Secara keseluruhan, tabel USG ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai mana saja isu yang perlu segera ditangani terlebih dahulu agar intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh Jaya dapat dilakukan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. Metode ini juga membantu merumuskan strategi kebijakan yang lebih terfokus, menghindari pendekatan reaktif yang bersifat jangka pendek, dan mendorong solusi berbasis bukti serta dampak nyata di lapangan.

1. Faktor Internal

Tabel *Internal Factor Evaluation* (IFE) yang disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dari metode USG memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan internal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengelola alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan berbasis bukti. Secara umum, terdapat lima faktor kekuatan dan lima faktor kelemahan yang dianalisis berdasarkan bobot kepentingan, tingkat kekuatan/kelemahan (rating), serta skor tertimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknis di Bapperida dan Dinas Sosial, yang mendapatkan bobot tinggi dan rating maksimal, menghasilkan skor tertinggi yaitu 45. Kekuatan lain yang signifikan adalah fleksibilitas pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang memperoleh skor 40. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural dan sumber daya, Aceh Jaya memiliki fondasi yang cukup kuat dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan jika dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, meskipun sistem data kemiskinan telah tersedia, keterbatasannya dalam integrasi lintas sektor menyebabkan skornya relatif lebih rendah. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) juga mulai tumbuh, namun kualitasnya masih harus ditingkatkan agar lebih bermakna dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Total keseluruhan skor kekuatan (S) mencapai 168, yang menandakan potensi internal cukup kuat sebagai pendorong kebijakan.

Di sisi lain, kelemahan internal yang paling mencolok adalah alokasi anggaran yang tidak berbasis pada kebutuhan riil, dengan skor 36, dan duplikasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghasilkan skor 35. Keduanya mencerminkan lemahnya perencanaan dan kurangnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran. Kelemahan lainnya termasuk minimnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, ketidakefektifan koordinasi antar sektor, serta masih rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan data kemiskinan. Total skor kelemahan (W) mencapai 137, yang menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan teknis masih cukup signifikan dan perlu segera dibenahi.

Bila dijumlahkan secara keseluruhan, total skor IFE adalah 305, dengan total bobot 80, sehingga menghasilkan nilai rata-rata 3,81 dari skala maksimal 5. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi internal Pemerintah Aceh Jaya tergolong kuat, namun masih menyimpan sejumlah kelemahan mendasar yang harus

diselesaikan untuk mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berbasis data. Hasil ini menjadi dasar penting untuk menyusun strategi yang memaksimalkan kekuatan internal sembari memperbaiki kelemahan yang menghambat optimalisasi anggaran dan program-program pengentasan kemiskinan.

Tabel 2. Matrix *Internal Factor Evaluation* (IFE Matrix)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
S1	Ketersediaan SDM teknis di Bapperida dan Dinsos	9	5	45
S2	Sistem data kemiskinan sudah tersedia, meski belum terintegrasi	8	4	32
S3	Partisipasi masyarakat mulai tumbuh melalui musrenbang	7	3	21
S4	Pemanfaatan Dana Desa cukup fleksibel untuk mendukung pemberdayaan	8	5	40
S5	Ketidaksesuaian data kemiskinan pusat-daerah	10	3	30
Total Strength (S)		42	20	168
W1	Minimnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan	8	3	24
W2	Alokasi anggaran tidak berbasis kebutuhan riil	9	4	36
W3	Duplikasi program dan anggaran antar OPD	7	5	35
W4	Koordinasi antar sektor belum efektif	8	3	24
W5	SDM pengelola data kemiskinan belum kompeten	6	3	18
Total Weakness (W)		38	18	137
Total IFE Score		80	38	305

Sumber: Hasil penghitungan IFE Matrix (2025)

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan tabel *External Factor Evaluation* (EFE), dapat dilakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan tekanan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan berbasis bukti di Kabupaten Aceh Jaya. Tabel ini menyusun lima faktor peluang (*opportunities*) dan lima faktor ancaman (*threats*) yang dinilai secara kuantitatif berdasarkan bobot kepentingan, rating kekuatan atau dampak, serta skor tertimbang. Total skor EFE yang diperoleh adalah 338, dengan total bobot keseluruhan 89 dan rating total 38, menghasilkan skor rerata sebesar 3,80. Angka ini berada di atas rata-rata, yang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal Aceh

Jaya sangat mendukung upaya optimalisasi kebijakan pengentasan kemiskinan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks.

Lima peluang strategis eksternal yang diidentifikasi memberikan kontribusi besar terhadap kekuatan kelembagaan daerah. Yang paling dominan adalah **dukungan kebijakan nasional terhadap pengentasan kemiskinan berbasis data** (O1), yang memiliki bobot tertinggi (10) dan rating maksimal (5), menghasilkan skor 50. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional sudah selaras dengan pendekatan yang diharapkan, sehingga dapat dijadikan dasar legitimasi untuk perbaikan sistem penganggaran daerah. Selanjutnya, **perkembangan teknologi informasi** (O4) juga mendapatkan skor tinggi (45), mencerminkan besarnya potensi pemanfaatan sistem digital untuk integrasi dan verifikasi data kemiskinan yang lebih akurat dan efisien.

Peluang lainnya seperti **ketersediaan dana transfer pusat dan Dana Desa yang stabil** (O2) serta **potensi kolaborasi dengan NGO, perguruan tinggi, dan sektor swasta** (O3) juga memiliki skor signifikan, masing-masing 40 dan 32. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan jejaring dan dukungan keuangan dari luar daerah sangat potensial jika dikelola secara kolaboratif. Terakhir, **keberadaan program pusat seperti DTKS, P3KE, dan bantuan sosial digital** (O5) menunjukkan bahwa perangkat teknis pendukung dari pusat sudah tersedia, tinggal diperkuat dalam hal implementasi daerah. Total skor peluang sebesar **191** menunjukkan bahwa kondisi eksternal menyediakan banyak celah untuk intervensi kebijakan yang progresif dan berbasis kolaborasi lintas aktor.

Di sisi lain, terdapat lima faktor ancaman yang menjadi tekanan eksternal bagi Pemda Aceh Jaya. Ancaman terbesar berasal dari **ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai jangka pendek** (T1) yang mendapat skor tertinggi (40), menandakan bahwa pendekatan bantuan konsumtif masih menjadi hambatan budaya dan psikologis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ancaman lain yang cukup signifikan adalah **resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem berbasis bukti** (T4) dengan skor 32, serta **ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah** (T3) dengan skor 30. Ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang melekat, baik dari sisi internal pemerintahan maupun keterbatasan akses masyarakat di wilayah terpencil.

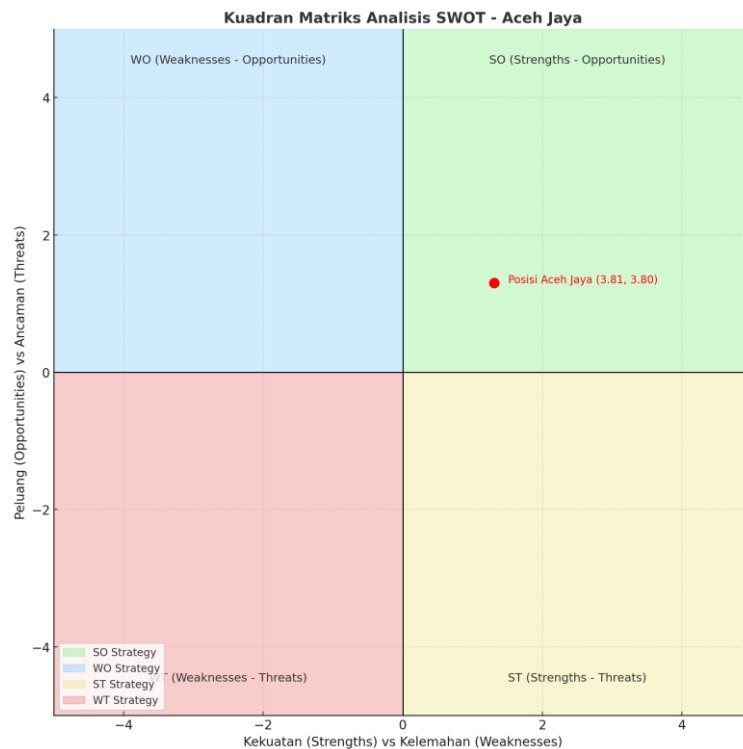
Selain itu, **risiko tumpang tindih program antara pusat dan daerah** (T2) juga patut diperhatikan, terutama karena lemahnya harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan. Sedangkan **kesenjangan digital** (T5) mencetak skor terendah (18), tetapi tetap relevan karena dapat memperlambat upaya digitalisasi data kemiskinan di wilayah terpencil. Total skor ancaman sebesar **147** mengisyaratkan bahwa meskipun peluang lebih dominan, faktor eksternal tetap menyimpan risiko yang harus dimitigasi secara strategis.

Dengan skor total EFE sebesar **3,80** dari skala maksimum 5, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berada dalam **posisi strategis eksternal yang sangat menguntungkan**. Dukungan kebijakan nasional, stabilitas dana pusat, serta perkembangan teknologi menjadi modal kuat dalam mendorong reformasi tata kelola pengentasan kemiskinan berbasis bukti. Namun, ancaman berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan konsumtif, ketimpangan infrastruktur, dan resistensi birokrasi tetap menjadi

faktor pembatas yang harus diatasi. Oleh karena itu, strategi yang perlu dikembangkan ke depan adalah **memanfaatkan peluang seoptimal mungkin sembari mengelola risiko eksternal secara progresif**, terutama dengan memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan kolaborasi lintas aktor, dan memastikan keberlanjutan program berbasis pemberdayaan.

Tabel 3. *Matrix External Factor Evaluation* (EFE Matrix)

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
O1	Dukungan kebijakan nasional terhadap pengentasan kemiskinan berbasis data	10	5	50
O2	Ketersediaan dana transfer pusat dan Dana Desa yang stabil	8	5	40
O3	Potensi kolaborasi dengan NGO, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk program pemberdayaan	8	4	32
O4	Perkembangan teknologi informasi untuk integrasi dan verifikasi data	9	5	45
O5	Adanya program pusat seperti DTKS, P3KE, dan bantuan sosial digital	8	3	24
Total Opportunities (O)		43	22	191
T1	Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai jangka pendek	10	4	40
T2	Risiko tumpang tindih program pusat-daerah karena lemahnya harmonisasi kebijakan	9	3	27
T3	Ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah	10	3	30
T4	Resistensi birokrasi daerah terhadap perubahan sistem berbasis bukti	8	4	32
T5	Kesenjangan digital di wilayah terpencil yang menghambat transformasi tata kelola data	9	2	18
Total Threats (T)		46	16	147
Total EFE Score		89	38	338



Gambar 1. Kuadran Matriks Analisis SWOT

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga erat kaitannya dengan ketimpangan akses terhadap layanan dasar, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya tata kelola kebijakan publik. Di tengah kompleksitas tersebut, Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang khas, menghadapi dilema serius dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Data yang tidak sinkron, rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan, serta keterbatasan kapasitas lembaga menjadi hambatan struktural yang terus mengemuka.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dukungan kebijakan nasional yang mendorong sistem pengelolaan data kemiskinan berbasis bukti, stabilitas dana transfer dari pusat, serta perkembangan teknologi informasi membuka ruang untuk pembaruan sistemik. Untuk itu, diperlukan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara menyeluruh agar strategi kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis konteks lokal.

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi SO bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal, dan menjadi strategi paling direkomendasikan

bagi Kabupaten Aceh Jaya karena posisi daerah berada pada kuadran I (skor IFE dan EFE tinggi). Pemerintah daerah memiliki SDM teknis yang kompeten, fleksibilitas Dana Desa, serta sistem data dasar yang mulai terbentuk. Sementara itu, peluang eksternal berupa dukungan kebijakan nasional berbasis data, ketersediaan dana transfer pusat, serta perkembangan teknologi digital menjadi faktor pendorong yang kuat. Oleh karena itu, strategi agresif diarahkan pada transformasi sistem data kemiskinan menjadi sistem digital terintegrasi lintas sektor dan lintas wilayah, yang dapat diakses real-time oleh pusat, daerah, dan desa. Selain itu, Dana Desa perlu dimanfaatkan secara inovatif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui program pelatihan, inkubasi usaha mikro, dan pengembangan UMKM lokal. Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, universitas, dan sektor swasta juga harus diperluas guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjembatani teknologi serta ide-ide baru ke dalam skema pengentasan kemiskinan. Strategi SO secara umum mencerminkan pendekatan proaktif, visioner, dan berorientasi pada perubahan sistemik jangka panjang.

2. Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Strategi ST digunakan untuk menggunakan kekuatan internal guna menghadapi ancaman eksternal yang dapat memperlambat atau menggagalkan program penanggulangan kemiskinan. Meskipun Aceh Jaya memiliki SDM teknis dan modal fiskal seperti Dana Desa, daerah ini tetap menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai, resistensi birokrasi terhadap sistem berbasis bukti, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk itu, strategi ST difokuskan pada penguatan kapasitas lokal sebagai respons terhadap tekanan sosial dan struktural. Dana Desa, misalnya, harus diarahkan bukan hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi sebagai modal sosial dalam mengembangkan kegiatan produktif yang membangun kemandirian. SDM teknis di OPD terkait juga dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, melalui pelatihan internal, sistem pelaporan kinerja digital, dan transparansi penggunaan anggaran. Sementara itu, ketimpangan infrastruktur dapat dikurangi melalui integrasi program lintas dinas dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Strategi ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan keberanian memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menahan gempuran tantangan yang sedang berlangsung.

3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi WO bertujuan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Kabupaten Aceh Jaya memiliki beberapa kelemahan mendasar seperti minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan data kemiskinan yang belum terstandar dan tidak terintegrasi, serta rendahnya kapasitas SDM pengelola data di tingkat desa. Di sisi lain, peluang eksternal seperti program nasional DTKS, bantuan pusat untuk

digitalisasi data, dan kemitraan strategis dengan NGO serta kampus sangat potensial dimanfaatkan. Oleh karena itu, strategi WO menekankan transformasi internal secara bertahap namun berkelanjutan. Pelatihan teknis bagi operator data dan aparatur desa harus dijadikan program prioritas, terutama dalam pemanfaatan aplikasi data sosial. Peluang digitalisasi juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong platform musrenbang digital, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih mudah dan transparan dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini juga mendorong transparansi dan partisipasi sebagai elemen kunci pemberdayaan. Dengan mengurangi kelemahan secara langsung dan mengisi kekosongan sistem dengan bantuan eksternal, strategi WO menjadi jembatan menuju penguatan sistemik dan keberlanjutan reformasi sosial.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Strategi WT merupakan strategi defensif, digunakan ketika organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup besar sekaligus menghadapi ancaman eksternal yang signifikan. Meski bukan pilihan utama, strategi ini sangat penting untuk mencegah keruntuhan sistem, kegagalan program, dan pemborosan anggaran. Dalam konteks Aceh Jaya, kelemahan seperti lemahnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas perencanaan anggaran, dan ketidakcakapan pengelola data dapat memperparah ancaman seperti resistensi birokrasi dan ketergantungan masyarakat pada bantuan. Oleh karena itu, strategi WT diarahkan pada reformasi bertahap dan manajemen risiko, seperti dengan menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata melalui regulasi lokal yang lebih ketat. Program pendidikan literasi ekonomi bagi masyarakat miskin juga menjadi penting untuk membentuk pola pikir mandiri dan mengurangi ketergantungan. Selain itu, audit internal dan evaluasi program oleh pihak ketiga (misalnya perguruan tinggi atau LSM) dapat membantu mendeteksi kelemahan sejak dini dan memperbaikinya sebelum menimbulkan krisis. Strategi WT lebih menekankan pada penyembuhan internal sambil membentengi diri dari risiko eksternal, sebagai fondasi untuk kemudian naik ke level strategi WO dan SO secara bertahap.

Untuk memilih strategi yang paling optimal di antara empat alternatif yang telah diidentifikasi melalui analisis SWOT (SO, ST, WO, dan WT), diperlukan sebuah kerangka evaluasi kebijakan yang objektif dan komprehensif. Mengadopsi pendekatan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, evaluasi alternatif kebijakan akan didasarkan pada enam kriteria utama. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, daya tanggap, dan kelayakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi objektif dengan kerangka William Dunn, **Strategi SO (Strengths-Opportunities) memperoleh skor tertinggi dengan total 29 poin**, jauh mengungguli alternatif lainnya.

Skor tinggi ini mencerminkan bahwa Strategi SO tidak hanya paling **efektif** dalam menciptakan perubahan sistemik, tetapi juga paling **efisien** dalam menggunakan sumber daya, paling **adil (ekuitas)** dalam mendistribusikan manfaat, serta sangat **patut (appropriate)** dan **layak (feasible)** untuk diimplementasikan mengingat kondisi internal dan eksternal Kabupaten Aceh Jaya.

Strategi ST dan WO, meskipun memiliki skor yang sama (22 poin), mewakili jalur yang berbeda. Strategi ST bersifat menjaga stabilitas, sementara Strategi WO bersifat perbaikan internal yang fundamental namun lambat. Keduanya merupakan alternatif yang baik namun tidak seoptimal SO. Strategi WT jelas merupakan pilihan yang harus dihindari.

Dengan demikian, hasil evaluasi ini memvalidasi bahwa **Strategi SO adalah pilihan kebijakan yang paling unggul dan direkomendasikan** untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya guna mengoptimalkan

Kemiskinan tidak hanya berbicara tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses terhadap layanan dasar, lemahnya peran masyarakat dalam pembangunan, serta tidak efektifnya tata kelola program yang berjalan. Di Kabupaten Aceh Jaya, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, namun hasil kajian menunjukkan bahwa akar persoalan masih berkulat pada persoalan klasik: data yang tidak akurat, anggaran yang belum berbasis bukti, serta lemahnya koordinasi lintas sektor Kabupaten Aceh Jaya. Untuk itu, hasil kajian ini memberikan satu rekomendasi yaitu:

Perbup (Peraturan Bupati) bersifat normatif-strategis, termasuk dalam kategori Perbup inisiatif eksekutif, yang ditetapkan untuk mengatur sistem dan tata kelola lintas sektor yang berdampak langsung pada kebijakan pengentasan kemiskinan dengan judul:

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya tentang Sistem Pengelolaan Data dan Alokasi Dana Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bukti”.

Perbup ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui proses legislasi melalui hasil pembahasan lintas dinas, terutama Bapperida dan Dinsostransnatker. Perbup ini ditujukan kepada:

1. Perangkat Daerah (OPD) seperti Bapperida, Dinsostransnatker, DPMPKB, dan Dinas Kominfo dan Persandian sebagai pelaksana teknis.
2. Pemerintah Gampong sebagai pelaksana di tingkat desa.

Dari data ke Dana

3. Tim Verifikasi dan Pemutakhiran Data Kemiskinan.
4. Lembaga pendamping, NGO dan perguruan tinggi mitra.
5. Masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.
- 6.

Substansi dan Tujuan Perbup:

1. Mengatur kewajiban pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan terintegrasi lintas OPD.
2. Menetapkan mekanisme perencanaan anggaran berbasis data kemiskinan yang valid.
3. Membentuk unit koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi program pusat-daerah.
4. Mengatur pelibatan masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan evaluasi program.
5. Menyediakan dasar hukum untuk digitalisasi sistem informasi kemiskinan daerah (SIKAD).

Perbup ini diharapkan menjadi kerangka hukum permanen yang mendorong reformasi tata kelola pengentasan kemiskinan di Aceh Jaya, memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran berbasis pada data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, dan kebutuhan nyata masyarakat. Keberadaan Perbup ini juga akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi publik, dan mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Amelia, R., & Hardiansyah, A. (2023). *Multidimensional poverty and household resilience: Case study in rural Kalimantan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 24(1), 45–58. <https://doi.org/10.24832/jep.v24i1.2023>
- Andika, R., & Ma'ruf, A. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Studi kasus di Musrenbangdes Jawa Barat*. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 122–136. <https://doi.org/10.31289/jap.v18i2.2021>
- Ardiansyah, M., & Dewi, L. (2021). *Pengukuran kemiskinan multidimensi menggunakan metode Alkire-Foster di Indonesia*. Sosiohumaniora, 23(3), 375–390. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.2021>
- Arifin, M., & Yuniar, F. (2024). *Digitalisasi zakat dan CSR untuk pengentasan kemiskinan berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 87–102. <https://doi.org/10.20885/jei.vol15.iss1.art5>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bebbington, A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty. *World Development*, 27(12), 2021–2044.

- Bebbington, A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability. *World Development*, 27(12), 2021–2044.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Fadhil, R., & Zakiah, A. (2022). *Musyawarah desa sebagai alat pengarusutamaan partisipasi warga miskin dalam perencanaan program sosial*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 211–230. <https://doi.org/10.21776/ub.jsp.2022.010.02.6>
- Fitri, L., & Mahendra, T. (2020). *Kemiskinan struktural dan kebijakan perlindungan sosial: Evaluasi program bantuan langsung tunai*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 34–47. <https://doi.org/10.25077/jkp.v12n1.2020>
- Fitriani, N., & Yusuf, M. (2024). *Mobile service as a solution to health service disparity in outermost and rural areas*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 50–66. <https://doi.org/10.20473/jkm.v19i1.2024>
- Hamid, A., & Surya, I. (2021). *Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 101–115. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.101-115>
- Handayani, L., & Syarif, B. (2020). *Pelibatan kelompok marginal dalam perencanaan desa inklusif*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 25–39. <https://doi.org/10.25105/jpd.v8i1.2020>
- Hidayat, A., & Rachman, N. (2023). *Kemitraan strategis pemerintah-swasta dalam pengembangan lapangan kerja desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 55–70. <https://doi.org/10.32812/jeb.v16i1.2023>
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. The World Bank.
- Maulida, N., & Rahmat, I. (2021). *Peran infrastruktur pendidikan dalam mendukung kualitas layanan dasar masyarakat miskin*. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(2), 112–127. <https://doi.org/10.21009/jpp.v9i2.2021>
- Mubarok, F., & Lestari, T. (2022). *Digitalisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis data kemiskinan*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 7(3), 97–111. <https://doi.org/10.24198/jmpd.v7i3.2022>
- Mulyono, A., & Harahap, S. (2022). *Ketimpangan akses kerja dan strategi pelatihan berbasis potensi lokal*. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 14(2), 80–95. <https://doi.org/10.25035/jki.v14n2.2022>
- Nugroho, B., & Lestari, D. (2022). *Digital transformation of public services for the poor in Indonesia*. *Journal of Public Administration Studies*, 18(1), 13–29. <https://doi.org/10.24832/jpas.v18i1.2022>
- Nurul, R., & Hadi, T. (2023). *Kemitraan publik-swakarsa dalam pengelolaan zakat produktif di pedesaan*. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam*, 11(1), 33–49. <https://doi.org/10.15408/ei.v11i1.2023>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Oktaviani, R., & Wibowo, R. (2020). *Jaminan kerja untuk sektor informal di tengah krisis ekonomi lokal*. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 8(3), 143–156. <https://doi.org/10.22146/jes.v8i3.2020>
- Prasetya, H., & Azizah, F. (2022). *Optimalisasi CSR dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2), 77–89. <https://doi.org/10.31599/jer.v10i2.2022>

- Putri, I., & Sari, I. (2020). *Analisis korelasi layanan publik dan indeks pembangunan manusia*. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.22146/jan.v15i1.2020>
- Rachman, A., & Fauziah, M. (2023). *Kualitas SDM tenaga kesehatan dan dampaknya terhadap pelayanan publik*. Jurnal Kesehatan Daerah, 11(2), 59–73. <https://doi.org/10.31289/jkd.v11i2.2023>
- Rismawati, D., Nugraha, S., & Hamzah, R. (2023). *Efektivitas forum TKPKD dalam sinkronisasi kebijakan kemiskinan*. Jurnal Kebijakan Sosial, 9(1), 90–106. <https://doi.org/10.24832/jks.v9i1.2023>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sofyan, M., & Prasetyo, A. (2023). *Model co-design planning dalam pengentasan kemiskinan komunitas*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 11(1), 100–118. <https://doi.org/10.29244/jpwk.11.1.100-118>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, R., & Amanda, F. (2024). *Perencanaan pembangunan berbasis komunitas miskin: Studi evaluatif*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 45–61. <https://doi.org/10.37263/jpm.v6i1.2024>
- Wahyuni, T., & Basri, M. (2022). *Akses terhadap hunian layak dan dampaknya pada indeks kesejahteraan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(2), 115–132. <https://doi.org/10.22146/jep.v13i2.2022>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*.
- Yuliana, S., & Sembiring, M. (2020). *Konflik antar lembaga dalam pelaksanaan program kemiskinan pasca otonomi daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(3), 223–238. <https://doi.org/10.31289/jip.v21i3.2020>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology*. Springer.
- Zulkarnain, B., & Munawar, A. (2020). *Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat*. Jurnal Ekonomi dan Zakat, 6(1), 91–104. <https://doi.org/10.15408/jez.v6i1.2020>
- Zulkifli, F., & Hanafiah, M. (2024). *Sinergi RPJMD dan strategi nasional dalam penurunan kemiskinan ekstrem*. Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional, 9(1), 73–89. <https://doi.org/10.24832/jppn.v9i1.2024>